

## 2.2. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

---

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten telah melaksanakan SOTK menurut Perda Nomor 8 Tahun 2016. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia/aparatur dan sumber daya aset/modal. Sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebanyak 86 orang. Berdasarkan jumlah pegawai tersebut, 69,77% atau 60 orang diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan 30,23% atau 26 orang berstatus non PNS. Jumlah dan distribusi pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten menurut status dan golongan dapat dilihat pada berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah dan Distribusi Pegawai**  
**Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Menurut Status dan Golongan**  
**(Per 31 Desember 2021)**

N O	STATUS	GOLONGAN				JUMLA H	(%)
		I	II	III	IV		
1.	Pegawai Negeri Sipil	0	11	35	14	60	69,77
2.	Pegawai Non PNS	0	0	0	0	26	30,23
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>9</b>	<b>86</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2021

Berdasarkan tingkat golongan, jumlah pegawai yang berstatus PNS (60 orang) didominasi oleh pegawai dengan tingkat golongan III, yaitu sebanyak 35 orang (58,33%). Hal ini mencerminkan, bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten didukung oleh kapasitas pegawai yang cukup berpengalaman (memiliki masa kerja yang cukup lama). Golongan IV dengan jumlah pegawai sebanyak 14 orang (23,33%). Sedangkan golongan II berjumlah 11 orang (18,33%). Sedangkan

berdasarkan tingkat pendidikannya, per 31 Desember 2021 aparat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan terakhir sarjana (S1, S2, dan S3) cukup dominan yaitu 46 orang dari jumlah total PNS 60 orang atau 76,66%, D3 sebanyak 6 orang atau 10,00% dan SMU/SMA sebanyak 8 orang atau 13,33%. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sudah memadai. Secara keseluruhan (PNS dan TKS) berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pegawai, komposisi pegawai tamatan SLTA sebanyak 25 orang (29,07%), kualifikasi DIII/Akademi sebanyak 11 orang (12,79%), dan lulusan S1 sebanyak 37 orang (43,02%), sedangkan pegawai lulusan S2 sebanyak 12 orang (13,95%) dan S3 sebanyak 1 orang atau 1,16%. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan kondisi distribusi pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten menurut tingkat serta tingkat pendidikannya dapat dilihat pada dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan (Per 31 Desember 2021)**

NO	STRUKTUR JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
		SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris/ Kepala Bidang	-	-	-	-	-	4	1	5
3.	Kepala Seksi/ Sub Bidang	-	-	-	-	7	7	-	14
4.	Pelaksana	8	-	-	7	21	4	-	40
5.	Pegawai Non PNS	15	-	-	1	10	-	-	25
<b>JUMLAH</b>		<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>86</b>
<b>PERSENTASE (%)</b>		<b>26,7</b> <b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,30</b>	<b>44,1</b> <b>8</b>	<b>17,4</b> <b>4</b>	<b>2,32</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2021

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Dinas Ketahanan Pangan sudah cukup tinggi, namun jika meninjau komposisi pegawai pada instansi saat ini, khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum memenuhi kondisi yang diharapkan. Adapun komposisi pegawai berdasar kuantitas dan kualitas pegawai sesuai kondisi saat ini (Per 31 Desember 2021) dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Kondisi Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah, Status dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten (Per 31 Desember 2021)**

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		PNS	STATUS	PENDIDIKAN
1.	Kepala Dinas	1	PNS	S3
2.	Sekretaris	1	PNS	S3
	□ Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan			
	□ Kepala Sub Bagian	1	PNS	S2/Manajemen
	□ Pelaksana	8	PNS	S2 = 2, S1 = 5, D3 = 1,
		3	TKS	S1 = 3
	□ Sub Bagian Kepegawaian dan Umum			
	□ Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1 /Ekonomi
	□ Pelaksana	7	PNS	S1= 5, SMU = 2 orang
		15	TKS	S1=2 orang, SMU =13 orang
3.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	1	PNS	S2/Manajemen

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		PNS	STATUS	PENDIDIKAN
	□ Seksi Ketersediaan Pangan			
	□ Kepala Seksi	1	PNS	S2
	□ Pelaksana	3	PNS	S1 = 2, SMU = 1
		1	TKS	SMU = 1
	□ Seksi Sumberdaya Pangan			
	□ Kepala Seksi	1	PNS	S1 = Kesehatan Masyarakat
	□ Pelaksana	3	PNS	S1 = 1, SMU = 2
	□ Seksi Kerawanan Pangan			
	□ Kepala Seksi	1	PNS	S1 = Pertanian
	□ Pelaksana	3	PNS	S1 = 2, SMU = 1
		1	TKS	D3 = 1
4.	Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan	1	PNS	S1 = Pemerintahan
	□ Seksi Harga Pangan			
	□ Kepala Seksi	1	PNS	S2
	□ Pelaksana	2	PNS	S2 = 1 D3 = 1
		1	TKS	SMU
	□ Seksi Cadangan Pangan			
	□ Kepala Seksi	1	PNS	S1
	□ Pelaksana	3	PNS	S1 = 1, D3 = 1, SMU = 1
		1	TKS	S1 = 1
	□ Seksi Distribusi Pangan			

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		PNS	STATUS	PENDIDIKAN
	□ Kepala Seksi	1	PNS	S2
	□ Pelaksana	5	PNS	S2 = 2, S1 = 2, D3 = 1
		2	TKS	D3 = 1, S1 = 1
5.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	PNS	S2 = Manajemen Kesmas
	□ Seksi Konsumsi Pangan			
	□ Kepala Seksi	1	PNS	S2
	□ Pelaksana	1	PNS	D3 = 1
		1	TKS	SMU = 1
	□ Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan			
	□ Kepala Seksi	1	PNS	S1
	□ Pelaksana	3	PNS	S1 = 2, D3 = 1
		1	TKS	S1 = 1
	□ Seksi Pengawasan Pangan			
	□ Kepala Seksi	1	PNS	S2
	□ Pelaksana	3	PNS	S1 = 1 D3 = 1, SMU = 1
<b>JUMLAH</b>		<b>86</b>		

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2021

Secara umum kondisi daya dukung sarana dan prasarana penunjang operasional pada dinas Ketahanan Pangan relatif memadai, sehingga cukup

membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga tercapainya kelancaran dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mencakup administrasi, kearsipan, perencanaan, dan pengendalian.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Berikut ini adalah rekapitulasi barang dan inventaris Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang tercatat pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Daftar Inventaris Barang Pemerintah Daerah**  
**pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten**  
**(Per 31 Desember 2021)**

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
1	Minibus (roda empat)	16	16	-
2	Minibus Carry (roda empat)	1	1	-
3	Daihatsu Grand Max (roda empat)	1	1	-
4	Honda Win (roda dua)	2	-	2
5	Honda Supra (roda dua)	1	-	1
6	Yamaha Yupiter MX (roda dua)	1	1	-
7	Honda Vario (roda dua)	12	12	-
8	Mesin ketik manual	1	-	1
9	Mesin ketik elektrik	2	2	-
10	Lemari besi 2 pintu	12	12	-
11	Filling Besi/Metal	10	10	-
12	Brankas	3	3	-

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
13	Lemari sorok	1	1	-
14	Papan Nama Instansi	1	-	1
15	Mesin Absensi	2	1	1
16	Meja Rapat	3	3	-
17	Sofa	2	2	
18	Lemari Es	1	1	-
19	AC Split	17	15	2
20	Televisi	2	2	-
21	Wireless	3	-	3
22	Camera Video	5	3	2
23	Dispenser	10	5	5
24	Handy Cam	3	1	2
25	PC Unit	28	19	9
26	Laptop	21	16	5
27	Notebook	7	4	3
28	Printer	35	25	10
29	Servers	3	-	3
30	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	-	1
31	Meja Kerja Pejabat Ess. II	2	2	-
32	Kursi Kerja Pejabat Ess. II	2	2	-
33	Lemari Buku untuk Ess. II	2	2	-
34	Lemari arsip untuk arsip dinamis	10	10	-
35	Buffet kayu	1	1	-
36	Buffet kaca	2	2	-

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
37	Proyector + attachment	7	7	-
38	Camera electronic	6	6	-
39	Facsimile	1	1	-
40	White board	6	6	-
41	Kursi besi/metal	30	15	15
42	Kursi putar	30	20	10
43	Meja kerja pejabat Ess. III	5	5	-
44	Meja kerja pejabat Ess. IV	5	5	-
45	Meja kerja pegawai non struktural	42	42	-
46	Kursi kerja pegawai non struktural	42	42	-
47	Rak peralatan	2	2	-
48	Pesawat telephone	5	5	-

Sampai dengan Desember 2021, kondisi prasarana dan sarana pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Sedangkan sarana dan prasarana kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten statusnya adalah pinjam pakai pada Balai Budaya Provinsi Banten. Mengingat kondisi tersebut, maka perlu adanya percepatan dukungan bagi pembangunan gedung/kantor yang layak dan representatif untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja aparatur Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

---

Untuk periode 2017-2022 Dinas Ketahanan Provinsi Banten sebagai lembaga penyelenggara urusan Pemerintahan Provinsi di bidang urusan pangan mempunyai fungsi sebagai inisiator, fasilitator dan regulator atas penyelenggaraan ketahanan pangan di Provinsi Banten dengan Output yang dihasilkan adalah Indek ketahanan Pangan Daerah. Dimana indeks ini dibangun dari beberapa pilar ketahanan pangan yaitu :

**(a) Ketersediaan Pangan,** Kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dimensi ketersediaan pangan diwakili oleh aspek kecukupan pangan dilihat dari dua indikator, yaitu kecukupan persediaan pangan dan tidak kekurangan pangan. Kecukupan persediaan pangan yang dimaksud adalah apakah kebutuhan akan pangan selama setahun yang lalu telah tercukupi dalam rumahtangga tersebut, serta untuk mengetahui kondisi ketersediaan pangan daerah, dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat; **(b) Keterjangkauan/Akses Pangan,** adalah kemampuan rumahtangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan; **(c) Pemanfaatan Pangan,** meliputi penggunaan pangan oleh rumahtangga serta meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air serta meliputi status kesehatan anggota rumahtangga. Dimensi pemanfaatan pangan sendiri diwakili dua aspek. Pertama, aspek kecukupan asupan untuk melihat status kesehatan yang diukur dengan dua indikator, yaitu kecukupan asupan kalori dan kecukupan asupan protein. Kedua, aspek kualitas air yang diukur oleh dua indikator, yakni kualitas sumber air utama untuk minum dan sumber air utama untuk masak serta **(d) Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT),** Peredaran pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan mutunya, meningkatkan daya saing produk pangan segar serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi

pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan peredaran produk pangan segar.

#### **2.4. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**

---

Capaian Kinerja outcome atas Indikator Ketersediaan Pangan selama periode tahun 2018-2021 tidak mencapai target hal ini dikarenakan oleh : a) terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah; b) belum tersediannya data dan informasi sumberdaya pangan sebagai basis informasi; c) belum adanya penetapan harga pangan lokal di tingkat Kabupaten/Kota; d) Daya beli masyarakat berkurang akibat PHK dampak Covid 19; e) Masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun serta; f) Kurangnya penggunaan teknologi yang digunakan pada saat proses tanam hingga masa panen komoditas pangan.

Capaian Kinerja outcome atas Indikator Keterjangkauan/Akses Pangan terkendala oleh : a) Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil, yang berakibat pada tingginya ongkos angkut; b) Terjadinya fluktuasi harga pangan, yang ditunjukkan oleh coefficient of variation (cv), yang berakibat pada inflasi beberapa komoditi pangan strategis; d) Tidak updatenya peta FSVA sebagai acuan dalam mengambil kebijakan dalam penanganan rawan pangan.

Capaian kinerja outcome Indikator Pemanfaatan Pangan terkendala oleh : a) relatif rendahnya pola konsumsi masyarakat yang beragam dikarenakan budaya masyarakat yang menganggap belum makan bila belum makan nasi; b) Belum optimalnya promosi B2SA ke level masyarakat secara menyeluruh; c) Belum seragamnya angka AKE di Kabupaten/Kota dalam menghitung skor PPH Konsumsi.

Capaian kinerja outcome indikator Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi, faktor pendorongnya adalah Besarnya kesadaran para pelaku usaha PSAT akan keamanan pangan, sedangkan faktor penghambatnya adalah Belum memadai dan mencukupinya fasilitasi UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.

**Tabel 2.5.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rensta Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Ratio Capaian (%)			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	<b>Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang Akuntabel</b>															
	<b>Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Nilai)</b>				85	85	85	85								
	<b>Program Tata Kelola Pemerintahan</b>															
	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) (Skala 1-4)				2,8				2,8				100			
	<b>Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan</b>															
	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%)					100	100			100	100			100	100	
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)					100	100			100	100			100	100	
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)					100	100			100	100			100	100	
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)					100	100			100	100			100	100	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>															
	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%)							100				100				100
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)							100				100				100
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)							100				100				100
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)							100				100				100
	<b>Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga</b>															
	<b>Indeks Ketahanan Pangan Daerah</b>				89,20	90,60	83,50	84,50	83,75	83,29	81,93	82,90	93,89	91,93	98,12	98,10
	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>															
	Ketersediaan pangan (%)				95,10	96,30	93,50		85,78	89,83	88,91		90,20	93,28	95,09	
	<b>Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan</b>															
	Keterjangkauan/ akses pangan (%)				82,50	85,50	84,50		68,89	82,19	81,02		83,50	96,13	95,88	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rensta Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Ratio Capaian (%)			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	<b>Program Perlindungan Konsumen Pangan</b>															
	Pemanfaatan Pangan (%)				90,00	90,00	80,50		65,89	77,84	75,85		73,21	86,49	94,22	
	Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi (S%)						10,00				16,88				168,80	
	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>															
	Keterjangkauan/ akses pangan (%)							85,50				80,21				93,81
	Pemanfaatan Pangan (%)							81,50				78,03				95,74
	<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>															
	Ketersediaan pangan (%)							94,50				90,45				95,71
	<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>															
	Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi (S%)							10,00				17,44				174,40

**Tabel 2.6**  
**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%	%	%	%
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>21.229.690.000</b>	<b>30.237.231.000</b>	<b>20.340.100.750</b>		<b>20.210.716.284</b>	<b>26.306.352.238</b>	<b>21.352.781.572</b>		<b>95,26</b>	<b>87,00</b>	<b>95,58</b>	
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>10.437.000.000</b>	<b>17.255.000.000</b>	<b>11.771.000.000</b>		<b>10.310.952.464</b>	<b>14.662.770.083</b>	<b>11.509.335.764</b>		<b>98,79</b>	<b>84,98</b>	<b>97,78</b>	
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>10.792.690.000</b>	<b>12.982.231.000</b>	<b>10.569.100.750</b>		<b>9.899.763.720</b>	<b>11.643.582.155</b>	<b>9.843.445.808</b>		<b>91,73</b>	<b>89,69</b>	<b>93,13</b>	
<b>I</b>	<b>PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN</b>	<b>5.899.526.600</b>	<b>6.058.364.775</b>	<b>5.176.822.400</b>		<b>5.262.860.920</b>	<b>5.310.409.087</b>	<b>4.818.109.295</b>		<b>89,21</b>	<b>87,65</b>	<b>93,07</b>	
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	85.812.600	80.030.000	30.260.000		62.796.600	76.530.000	30.260.000		73,18	95,63	100,00	
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	269.725.000	149.935.000	210.730.000		253.792.500	148.435.000	210.545.000		94,09	99,00	99,91	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	745.102.400	1.099.811.275			726.163.400	1.051.568.900			97,46	95,61		
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1.199.580.100	1.331.275.000			1.111.127.600	1.301.204.800			92,63	97,74		
5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.850.528.500	2.438.663.500			1.717.378.910	1.999.622.794			92,80	82,00		
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur	91.000.000	87.520.000	54.900.000		82.700.000	84.720.000	53.100.000		90,88	96,80	96,72	
7	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah	1.410.558.000	645.400.000			1.063.840.710	424.541.993			75,42	65,78		
8	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	25.000.000	15.000.000	20.450.000		24.434.000	14.780.000	20.100.000		97,74	98,53	97,74	
9	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	222.220.000	160.730.000			220.627.200	159.930.000			99,28	99,50		
10	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan		50.000.000	242.200.000			49.075.600	236.799.240			98,15	97,77	
11	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran			4.618.282.400				4.267.305.019				92,40	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>989.783.400</b>	<b>2.194.270.225</b>	<b>1.206.770.300</b>		<b>891.095.900</b>	<b>1.825.514.100</b>	<b>1.101.374.117</b>		<b>90,03</b>	<b>83,19</b>	<b>91,27</b>	
12	Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah	163.564.400	238.352.000	66.944.000		154.064.400	232.009.500	54.383.707		94,19	97,34	81,24	
13	Pengelolaan Sumberdaya Pangan	192.250.000	668.550.000	212.550.000		184.525.000	645.426.600	192.354.910		95,98	96,54	90,50	
14	Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	378.175.000	947.243.000	772.529.500		375.775.000	845.793.000	763.995.500		99,37	89,29	98,90	
15	Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten	255.794.000	340.125.225	154.746.800		176.731.500	102.285.000	90.640.000		69,09	30,07	58,57	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETERJANGKAUAN PANGAN</b>	<b>2.160.734.000</b>	<b>2.176.796.000</b>	<b>2.427.955.050</b>		<b>2.076.624.000</b>	<b>2.034.539.000</b>	<b>2.263.155.198</b>		<b>96,11</b>	<b>93,46</b>	<b>93,21</b>	
16	Pengelolaan Penataan Harga Pangan	169.979.000	351.895.000	1.862.703.200		169.979.000	341.603.000	1.742.378.698		100,00	97,08	93,54	
17	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan	1.505.120.000	920.196.000	379.448.250		1.421.010.000	872.851.000	343.483.400		94,41	94,85	90,52	
18	Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan	485.635.000	904.705.000	185.803.600		485.635.000	820.085.000	177.293.100		100,00	90,65	95,42	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN</b>	<b>1.724.646.000</b>	<b>2.552.800.000</b>	<b>1.757.553.000</b>		<b>1.669.182.900</b>	<b>2.473.119.968</b>	<b>1.660.807.234</b>		<b>95,78</b>	<b>96,88</b>	<b>94,50</b>	
19	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan	490.610.000	1.140.557.000	687.906.000		480.178.800	1.101.425.168	617.472.250		97,87	96,57	89,76	
20	Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan	659.780.000	653.568.000	693.954.000		631.794.000	643.311.000	687.157.500		95,76	98,43	99,02	
21	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	592.256.000	453.501.500	106.010.000		557.210.100	444.279.800	101.026.484		98,08	97,97	95,30	
22	Sertifikasi dan pengujian Mutu Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan		231.625.500	166.957.000			216.454.000	155.072.500			93,45	92,88	
23	Pelayanan Teknis Keamanan Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan		73.548.000	100.726.000			67.650.000	100.078.500			91,98	97,42	
<b>A</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>23.724.399.705</b>				<b>21.091.482.463</b>				<b>88,90</b>

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%	%	%	%
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>19.155.024.705</b>				<b>16.818.933.297</b>				87,80
<b>1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>139.021.000</b>				<b>136.723.500</b>				98,35
a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				41.310.000				39.310.000				95,16
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				8.420.000				8.420.000				100,00
c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				8.420.000				8.420.000				100,00
d	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.420.000				3.420.000				100,00
e	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				5.241.000				5.241.000				100,00
f	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				23.385.000				23.087.500				98,73
g	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				48.825.000				48.825.000				100,00
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>15.990.218.705</b>				<b>13.883.637.419</b>				86,83
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.585.354.705				13.495.472.419				86,59
b	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				354.864.000				338.165.000				95,29
c	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.000.000				15.000.000				100,00
d	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000				5.000.000				100,00
e	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				5.000.000				5.000.000				100,00
f	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				25.000.000				25.000.000				100,00
<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>61.284.000</b>				<b>60.784.000</b>				99,18
a	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				61.284.000				60.784.000				99,18
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>576.493.000</b>				<b>559.372.091</b>				97,03
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.500.000				10.242.000				97,54
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				93.020.000				92.528.750				99,47
c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				207.738.800				195.102.000				93,92
d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				79.690.000				78.822.500				98,91
e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				11.820.000				11.784.000				99,70
f	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material				736.200				-				0,00
g	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				152.988.000				151.192.841				98,83
h	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000				19.700.000				98,50
<b>5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.361.130.000</b>				<b>1.228.934.863</b>				90,29
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000				3.000.000				100,00
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				276.000.000				188.340.959				68,24

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%	%	%	%
c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.082.130.000				1.037.593.904				95,88
<b>6</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>891.320.000</b>				<b>815.992.100</b>				91,55
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				665.820.000				608.970.900				91,46
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				125.500.000				108.580.000				86,52
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000				98.441.200				98,44
<b>7</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>117.958.000</b>				<b>115.890.324</b>				98,25
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.270.000				4.270.000				100,00
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.453.000				28.425.000				99,90
c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				48.905.000				48.241.500				98,64
d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.500.000				20.500.000				100,00
e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000				3.000.000				100,00
f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.830.000				11.453.824				89,27
<b>8</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.100.000</b>				<b>2.100.000</b>				100,00
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.100.000				2.100.000				100,00
<b>9</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>15.500.000</b>				<b>15.499.000</b>				99,99
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.000.000				13.999.000				99,99
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.500.000				1.500.000				100,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>				<b>3.609.568.000</b>				<b>3.398.043.311</b>				94,14
<b>10</b>	<b>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>				<b>317.244.000</b>				<b>265.877.888</b>				83,81
a	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				73.184.000				58.609.040				80,08
b	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan				244.060.000				207.268.848				84,93
<b>11</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</b>				<b>2.781.855.000</b>				<b>2.656.158.534</b>				95,48
a	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				115.670.000				85.425.222				73,85
b	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				2.666.185.000				2.570.733.312				96,42
<b>12</b>	<b>Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</b>				<b>100.000.000</b>				<b>88.760.889</b>				88,76
a	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				100.000.000				88.760.889				88,76
<b>13</b>	<b>Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan</b>				<b>410.469.000</b>				<b>387.246.000</b>				94,34

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%	%	%	%
	<b>Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi</b>												
a	Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				323.949.000				307.846.000				95,03
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				86.520.000				79.400.000				91,77
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>				<b>463.503.000</b>				<b>426.932.320</b>				92,11
<b>14</b>	<b>Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</b>				<b>463.503.000</b>				<b>426.932.320</b>				92,11
a	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi				463.503.000				426.932.320				92,11
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>				<b>496.304.000</b>				<b>447.573.535</b>				90,18
<b>15</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>496.304.000</b>				<b>447.573.535</b>				90,18
a	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi				163.258.000				141.356.515				86,58
b	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				165.600.000				162.131.520				97,91
c	Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				167.446.000				144.085.500				86,05
<b>B</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>203.529.000</b>				<b>198.923.000</b>				97,74
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				<b>203.529.000</b>				<b>198.923.000</b>				97,74
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>98.887.000</b>				<b>94.782.000</b>				95,85
a	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				98.887.000				94.782.000				95,85
<b>2</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>104.642.000</b>				<b>104.141.000</b>				99,52
b	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				104.642.000				104.141.000				99,52
		<b>21.229.690.000</b>	<b>30.237.231.000</b>	<b>20.340.100.750</b>	<b>23.927.928.705</b>	<b>20.210.716.284</b>	<b>26.306.352.238</b>	<b>21.352.781.572</b>	<b>21.290.405.463</b>	<b>95,26</b>	<b>87,00</b>	<b>95,58</b>	<b>88,98</b>

#### 2.4.1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Daya dukung wilayah Provinsi Banten dalam menyediakan pangan bagi penduduknya pada tahun 2021 adalah sebesar 104,9% dari AKE atau setara dengan 2.517 kkal/kapita/hari. Adapun ketersediaan protein sebesar 83,98 g/kap/hari.. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa penyediaan pangan di Provinsi Banten sudah mandiri dalam artit Provinsi sudah mampu menyediakan kebutuhan pangan penduduknya. Namun, dilihat dari skor PPH menunjukkan bahwa jenis bahan pangan yang dapat disediakan oleh Provinsi Banten masih belum beragam sesuai dengan norma standar untuk hidup sehat. Oleh karena itu, selain bertumpu pada produksi sendiri ketersediaan pangan Provinsi Banten masih harus ditopang oleh pasokan dari daerah lain (impor). Sehingga situasi ketersediaan pangan Provinsi Banten tahun 2021 disusun juga dengan menggunakan data ekspor-impor pangan menggunakan pendekatan data estimasi.

Pangan yang tersedia di Provinsi Banten sudah cukup beragam dengan skor PPH sebesar 96,06. Pangan yang sudah mencapai skor PPH maksimum adalah padi-padian (25,0), pangan hewani (24), pangan minyak dan lemak (5,0) Kacang-kacangan (10) serta Sayuran dan buah (30). Pangan yang belum mencapai skor PPH maksimum adalah umbi-umbian (0,9 dari 2,5), buah biji berminyak (0 dari 1), Serta gula (1,1 dari 2,5).

**Tabel.2.7**  
**Produksi Komoditas Pangan Nabati di Provinsi Banten**

No	Jenis Pangan	Jumlah Produksi (Ton)		
		2019	2020	2021
1	Beras	64.582	883.221,70	1.339.835
2	Jagung	103.709	119.206	98.349
3	Kedelai	1.202	1.202	11.668
4	Kacang Tanah	6.916	3.942	4.544
5	Ubi Kayu	70.915	70.915	60.038
6	Ubi Jalar	12.788	12.788	15.284
7	Sayur	413.502	149.066	162.054
8	Buah-Buahan	148.518	473.915	470.406

Sumber : Neraca Bahan Makanan Tahun 2019-2021

**Tabel.2.8**  
**Produksi Komoditas Pangan Hewani di Provinsi Banten**

No	Jenis Pangan	Jumlah Produksi (Ton)		
		2019	2020	2021
1	Daging Sapi dan Kerbau	42.178	42.178	21.421,66
2	Daging Ayam	137.197	137.197	4.838,24
3	Telur	46.974	9.016	35.691,00
4	Susu	3.701	3,6	66.747,75
5	Ikan	14.798	14.797,53	14.797,53

Sumber : Neraca Bahan Makanan Tahun 2019-2021

**Tabel.2.9**  
**Ketersediaan Energi dan Protein di Provinsi Banten**

No	Jenis Pangan	Jumlah		
		2019	2020	2021
1	Energi (Kal/Kap/Hari)	2.584	2.546	2.517
2	Protein (Gram/Kap/Hari)	76,43	68,23	83,98

Sumber : Neraca Bahan Makanan Tahun 2019-2021

Data cadangan pangan (beras) stok akhir tahun 2021 yaitu sebanyak 301.784,01 kg dengan stok awal tahun 402.588,59 kg yang disimpan di Bulog.

**Tabel.2.10**  
**Jumlah Stok CPP di Provinsi Banten (Kg)**

Tahun	Stok Awal	Pengadaan	Penyaluran	Penyusutan	Stok Akhir
2018	108.247,81	116.000	-	15.313,12	208.934,69
2019	208.934,69	45.000	-	4.651,84	249.282,85
2020	249.282,85	985.916	831.830	780,26	402.588,59
2021	402.588,59	211.100	305.805	6.054,58	301.784,01

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

**Tabel.2.11**  
**PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten**

No	Kab/Kota PDRB	PDRB ADHK Menurut Kab/kota Di Provinsi (Juta Rupiah)		
		2018	2019	2020
1	Kab. Pndeglang	18 812 931,91	19 705 734,19	19 600 075,14
2	Kab. Lebak	19 735 870,92	20 830 482,66	20 646 560,58
3	Kab. Tangerang	92 011 405,21	97 142 198,47	93 544 933,63
4	Kab. Serang	51 754 319,98	54 349 794,59	53 286 830,97
5	Kota Tangerang	106 283 617,41	110 592 776,31	102 942 389,09

No	Kab/Kota PDRB	PDRB ADHK Menurut Kab/kota Di Provinsi (Juta Rupiah)		
		2018	2019	2020
6	Kota Cilegon	70 502 082,41	74 249 299,43	73 596 660,22
7	Kota Serang	21 482 093,45	22 813 096,37	22 518 203,96
8	Kota Tangsel	55 999 106,77	60 145 115,32	59 537 303,12

Sumber : BPS Tahun 2018-2020

#### 2.4.2. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Penganekaragaman pangan merupakan salah satu strategi untuk mencapai ketahanan pangan. Salah satu upaya peningkatan penganekaragaman pangan yaitu dengan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang diwujudkan melalui pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Konsumsi penduduk Provinsi Banten pada tahun 2021 adalah sebesar 103,4% dari AKE atau setara dengan 2.223 kkal/kapita/hari. Skor PPH Provinsi Banten pada Tahun 2021 adalah 84,0. mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan dalam pola konsumsi pangan yang mengarah pada pola konsumsi yang semakin beragam dan bergizi seimbang. Nilai/skor mutu PPH ini dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kuantitas dan kualitas konsumsi, yang menggambarkan pencapaian keragaman konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan konsumsi, dinilai semakin baik.

**Tabel.2.12**  
**Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan di**  
**Provinsi Banten**

No	Kelompok Pangan	Jumlah Konsumsi (Kg)		
		2019	2020	2021
1	Padi-padian	124	121,4	121,83
2	Umbi-umbian	13,1	13,3	13,6
3	Pangan Hewani	48	47,2	41
4	Minyak dan Lemak	10,4	11,1	11,3
5	Buah/Biji Berminyak	0,7	0,6	0,8
6	Kacang-kacangan	14	13,1	13
7	Gula	4,6	5	4,8
8	Sayur dan Buah	93,2	88,7	86,8

Sumber : Anaisi PPh Susenas Tahun 2019-2021

Pembangunan keamanan pangan merupakan bagian integral pembangunan ketahanan pangan yang tidak dapat terpisahkan dan penting dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan dapat menjamin tersedianya pangan aman, termasuk pangan segar dan makanan siap saji untuk dikonsumsi masyarakat. Sehingga masyarakat terhindar dari pangan yang terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia maupun cemaran fisik. Untuk itu keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, produsen pangan dan masyarakat.

Sejak berdirinya UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, jumlah sertifikat yang diterbitkan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha PSAT sudah banyak yang mengindahkan penjaminan mutu dan keamanan PSAT.

Jumlah pelaku usaha PSAT yang sudah mendapatkan sertifikat/register mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 13 pelaku usaha pada tahun 2017 hingga 30 pelaku usaha di tahun 2020.

Berdasarkan grafik di bawah ini menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dari 32 sertifikat menjadi 135 sertifikat. Register/Izin Edar PSAT menempati urutan yang terbanyak dalam pelayanan, yaitu 246 register dan terendah izin rumah kemas 6 sertifikat.

**Tabel.2.13**

**Rekapitulasi Sertifikat dan Register PSAT Tahun 2016-2020**

REKAPITULASI SERTIFIKAT DAN REGISTER PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (Tahun 2016 – 2020)								
NO.	KABUPATEN/KOTA	SERTIFIKAT			JUMLAH	REGISTER	JUMLAH	TOTAL
		PRIMA 3	JAMINAN MUTU HYDROPONIK	RUMAH KEMAS		PSAT		
1	Kabupaten Lebak	4	0	0	4	11	11	15
2	Kabupaten Pandeglang	5	0	0	5	11	11	16
3	Kabupaten Serang	7	0	1	8	6	6	14
4	Kabupaten Tangerang	4	1	2	7	91	91	98
5	Kota Cilegon	1	0	0	1	5	5	6
6	Kota Tangerang	7	11	2	20	56	56	76
7	Kota Serang	1	4	0	5	6	6	11
8	Kota Tangsel	0	0	1	1	60	60	61
<b>JUMLAH</b>		<b>29</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>51</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>297</b>

Dinas Ketahanan Pangan

2.4.3. Penanganan Kerawanan Pangan

Berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan Indonesia ( Food Security and Vulnerability Atlas, FSVA), Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mengutamakan penanganan Daerah Rawan Pangan pada

prioritas 1 s.d. 3 (sangat rentan, rentan, cukup rentan). Kerentanan terhadap kerawanan pangan disebabkan oleh beberapa hal : angka kemiskinan yang masih tinggi, tidak ada akses listrik, kasus underweight pada balita masih tinggi, tidak ada akses jalan untuk kendaraan roda 4, tidak ada sumber air bersih, dan rasio konsumsi normative perkapita terhadap ketersediaan sereal meningkat.

Oleh karena itu, penanganan serius dan komprehensif terhadap daerah-daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan sangat diperlukan. Untuk penanganan kerawanan pangan dibutuhkan intervensi berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan, baik transien maupun kronis.

Berdasarkan hasil analisis komposit FSVA Provinsi Banten Tahun 2021, dari total 155 Kecamatan yang ada di Provinsi Banten terdapat 18 Kecamatan (11,6%) yang masuk ke dalam prioritas 1-3 (rentan rawan pangan) dan 137 Kecamatan lainnya (88,4%) masuk ke dalam prioritas 4-6 (tahan pangan) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel.2.14**  
**Sebaran Kecamatan berdasarkan Prioritas Hasil Analisis**  
**Komposit FSVA Provinsi Banten Tahun 2021**

Prioritas	Jumlah Kecamatan	Persentase
1	1	0,64
2	3	1,93
3	14	9.03
4	42	27,1
5	62	40
6	33	21,3
Total	155	100

Sumber : Peta FSVA Provinsi Banten Tahun 2021

Sebaran wilayah Kecamatan prioritas 1-3 (rentan rawan pangan) terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Serang. Kecamatan prioritas 1 terdapat di Kabupaten Tangerang (1 Kecamatan). Kecamatan Prioritas 2 terdapat di Kabupaten Tangerang (3 Kecamatan). Kecamatan Prioritas 3 terdapat di Kabupaten Pandeglang (1 Kecamatan), Kabupaten Tangerang (9 Kecamatan), Kabupaten Serang (2 Kecamatan), dan Kota Serang (2 Kecamatan).

**Tabel 2.15**  
**Hasil Analisis Komposit FSVA Provinsi Banten Tahun**  
**2021 Prioritas 1-3**

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Prioritas
1	Tangerang	Cisauk	1
2	Tangerang	Curug	2
3	Tangerang	Pagedangan	2
4	Tangerang	Kosambi	2
5	Tangerang	Labuan	3
6	Pandeglang	Cikupa	3
7	Tangerang	Kelapa Dua	3
8	Tangerang	Pasar Kemis	3
9	Tangerang	Gunung Kaler	3
10	Tangerang	Kemiri	3
11	Tangerang	Sepatan	3
12	Tangerang	Sepatan Timur	3
13	Tangerang	Pakuhaji	3
14	Tangerang	Teluknaga	3
15	Serang	Waringin Kurung	3
16	Serang	Pulo Apel	3
17	Kota Serang	Curug	3
18	Kota Serang	Kasemen	3

Sumber : Peta FSVA Provinsi Banten Tahun 2021

Sedangkan sebaran wilayah untuk Kecamatan prioritas 4-6 (tahan pangan) menyebar di 4 Kabupaten dan 4 Kota. Kecamatan prioritas 4 terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang. Kecamatan Prioritas 5 terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Serang. Kecamatan prioritas 6 terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

**Tabel 2.16**  
**Hasil Analisis Komposit FSVA Provinsi Banten Tahun**  
**2021 Prioritas 4-6**

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Prioritas
1	Pandeglang	Sumur	4
2	Pandeglang	Cibaliung	4
3	Pandeglang	Cibitung	4
4	Pandeglang	Picung	4
5	Pandeglang	Cisata	4
6	Pandeglang	Jiput	4
7	Pandeglang	Pulosari	4
8	Pandeglang	Mandalawangi	4
9	Pandeglang	Cimanuk	4
10	Pandeglang	Kaduhejo	4
11	Pandeglang	Mekarjaya	4
12	Pandeglang	Majasari	4
13	Pandeglang	Cadasari	4
14	Pandeglang	Karangtanjung	4
15	Pandeglang	Koroncong	4
16	Lebak	Cilograng	4
17	Lebak	Cijaku	4
18	Lebak	Sobang	4

19	Lebak	Cimarga	4
20	Lebak	Rangkasbitung	4
21	Tangerang	Cisoka	4
22	Tangerang	Solear	4
23	Tangerang	Tigaraksa	4
24	Tangerang	Jambe	4
25	Tangerang	Panongan	4
26	Tangerang	Legok	4
27	Tangerang	Sindang Jaya	4
28	Tangerang	Balaraja	4
29	Tangerang	Jayanti	4
30	Tangerang	Sukamulya	4
31	Tangerang	Kresek	4
32	Tangerang	Kronjo	4
33	Tangerang	Mekar Baru	4
34	Tangerang	Mauk	4
35	Tangerang	Sukadiri	4
36	Tangerang	Rajeg	4
37	Serang	Cinangka	4
38	Serang	Ciomas	4
39	Serang	Pabuaran	4
40	Serang	Cikande	4
41	Serang	Mancak	4
42	Serang	Pontang	4
43	Pandeglang	Cimanggu	5
44	Pandeglang	Cigeulis	5
45	Pandeglang	Panimbang	5
46	Pandeglang	Sobang	5
47	Pandeglang	Munjul	5
48	Pandeglang	Angsana	5
49	Pandeglang	Sindangresmi	5
50	Pandeglang	Bojong	5
51	Pandeglang	Saketi	5
52	Pandeglang	Pagelaran	5

53	Pandeglang	Sukaesmi	5
54	Pandeglang	Carita	5
55	Pandeglang	Cikedal	5
56	Pandeglang	Cipeucang	5
57	Pandeglang	Banjar	5
58	Lebak	Malingping	5
59	Lebak	Wanasalam	5
60	Lebak	Cihara	5
61	Lebak	Bayah	5
62	Lebak	Cibeber	5
63	Lebak	Cigemblong	5
64	Lebak	Banjarsari	5
65	Lebak	Cileles	5
66	Lebak	Cirinten	5
67	Lebak	Leuwidamar	5
68	Lebak	Muncang	5
69	Lebak	Cipanas	5
70	Lebak	Lebakgedong	5
71	Lebak	Sajira	5
72	Lebak	Cikulur	5
73	Lebak	Warunggunung	5
74	Lebak	Cibadak	5
75	Lebak	Kalanganyar	5
76	Lebak	Maja	5
77	Lebak	Curugbitung	5
78	Serang	Padarincang	5
79	Serang	Gunung Sari	5
80	Serang	Baros	5
81	Serang	Petir	5
82	Serang	Tunjung Teja	5
83	Serang	Cikeusal	5
84	Serang	Pamarayan	5
85	Serang	Bandung	5
86	Serang	Jawilan	5

87	Serang	Kopo	5
88	Serang	Kibin	5
89	Serang	Kragilan	5
90	Serang	Anyar	5
91	Serang	Bojonegara	5
92	Serang	Kramatwatu	5
93	Serang	Lebak Wangi	5
94	Serang	Carenang	5
95	Serang	Tirtayasa	5
96	Serang	Tanara	5
97	Tangerang	Benda	5
98	Cilegon	Ciwandan	5
99	Cilegon	Pulomerak	5
100	Cilegon	Cilegon	5
101	Serang	Walantaka	5
102	Serang	Cipocok Jaya	5
103	Serang	Serang	5
104	Serang	Taktakan	5
105	Pandeglang	Cikeusik	6
106	Pandeglang	Patia	6
107	Pandeglang	Menes	6
108	Pandeglang	Pandeglang	6
109	Lebak	Panggarangan	6
110	Lebak	Gunung Kencana	6
111	Lebak	Bojongmanik	6
112	Serang	Ciruas	6
113	Serang	Binuang	6
114	Tangerang	Ciledug	6
115	Tangerang	Larangan	6
116	Tangerang	Karang Tengah	6
117	Tangerang	Cipondoh	6
118	Tangerang	Pinang	6
119	Tangerang	Tangerang	6
120	Tangerang	Karawaci	6

121	Tangerang	Jati Uwung	6
122	Tangerang	Cibodas	6
123	Tangerang	Periuk	6
124	Tangerang	Batuceper	6
125	Tangerang	Neglasari	6
126	Cilegon	Citangkil	6
127	Cilegon	Purwakarta	6
128	Cilegon	Grogol	6
129	Cilegon	Jombang	6
130	Cilegon	Cibeber	6
131	Tangerang Selatan	Setu	6
132	Tangerang Selatan	Serpong	6
133	Tangerang Selatan	Pamulang	6
134	Tangerang Selatan	Ciputat	6
135	Tangerang Selatan	Ciputat Timur	6
136	Tangerang Selatan	Pondok Aren	6
137	Tangerang Selatan	Serpong Utara	6

Sumber : Peta FSVA Provinsi Banten Tahun 2021

Kabupaten Tangerang memiliki tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan yang paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Banten. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah kecamatan yang lebih besar pada prioritas 1-3. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik (Prioritas 6) terdapat di Kota Tangerang Selatan (100%) dan Kota Tangerang (92%).